

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pada hakikatnya eksistensi manusia dalam sebuah *polis* adalah membangun kolaborasi demi tujuan bersama. Kolaborasi itu mau menerangkan, bahwa secara kodrat manusia adalah makhluk sosial yang selalu berelasi dengan manusia lainnya. Dalam sebuah *polis*, setiap pribadi saling berinteraksi serta menjelmakan dirinya untuk ada bersama dengan yang lain. Kolaborasi itu juga menuntut sikap kerendahan hati yang sebetulnya telah terpampang dalam tubuh Pancasila. Manusia Indonesia perlu mendobrak sekat pemisah yang cenderung melahirkan sikap diskriminatif. Sikap di mana seseorang atau kelompok tertentu melakukan pengelompokan-pengelompokan di tengah kehidupan bersama. Manusia Indonesia yang mengedepankan kekeluargaan mesti berpegang pada demokrasi Pancasila. Artinya, demokrasi yang dibangun mesti didorong oleh sikap jujur, kekompakan, partisipasi aktif, dan cinta tanah air. Pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi Pancasila. Pemilu itu mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab seperti yang diharapkan oleh demokrasi Pancasila itu sendiri.

Meskipun demikian, masih ada penindasan dari satu pribadi terhadap pribadi lainnya. Keberkuasaan dan gaya pemimpin yang otoriter dari setiap pribadi cenderung membatasi hak sesama dalam menyatakan pendapat. Model kepemimpinan itu menciptakan kemiskinan dan penindasan dalam kehidupan bersama. Selain itu, menjadi sumber konflik dalam komunitas masyarakat. Realitas ini yang sedang dihadapi oleh Negara Indonesia saat ini, dan Desa Compang Congkar khususnya. Praktik demokrasi yang ditandai dengan aktivitas pemilihan umum menjadi akar konflik dalam komunitas masyarakat. Kaum kapitalis memanfaatkan situasi itu untuk menindas kaum miskin dan mengeksplor hak pilih dari kaum miskin. Pergerakan dari kaum kapitalis menjadi akar konflik politik. Di sini terjadi praktik pembelian suara atau yang biasa disebut (*money politic*). Bagi kaum kapitalis, uang menjadi sarana yang efektif untuk memenangkan seorang pemimpin. Pemimpin tidak lagi dimenangkan melalui proses demokrasi, akan tetapi ditentukan melalui banyaknya uang yang diedarkan. Tak dapat dipungkiri, pemimpin yang dilahirkan cenderung bersikap egois dan individualistis. Kecenderungan dalam mengedepankan sikap ego membuat seorang pemimpin lebih memprioritaskan teman kerja dan golongan tertentu. Dengan demikian, rakyat tidak memiliki

kebebasan dalam menyatakan pendapat dan bahkan tidak dipandang sebagai empunya kedaulatan.

Konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa Compang Congkar juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor pendidikan, fanatisme berlebihan, perbedaan pendapat, politik uang, dan lain sebagainya. Pelbagai faktor tersebut selalu ditemukan dalam perhelatan politik pemilihan Kepala Desa Compang Congkar, salah satunya adalah rendahnya pendidikan. Rendahnya pendidikan membuat masyarakat tidak mempunyai perspektif yang matang tentang politik. Pemahaman mereka dalam kegiatan pemilihan Kepala Desa hanya sebatas pada pemberian suara saja. Yang paling penting bagi mereka adalah hak pilih itu benar-benar diaplikasikan melalui pemilihan umum. Pertimbangan rasional tidak lagi diutamakan dalam memilih pemimpin yang berintegritas. Hal ini sangat nyata dalam praktik kehidupan politik masyarakat Compang Congkar.

Kenyataan tersebut semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat Compang Congkar. Dalam kehidupan politik, seluruh masyarakat Compang Congkar merasakan dan mengalami ketidakadilan, seperti tidak mengakses infrastruktur yang layak. Selain itu, kehidupan politik masyarakat Compang Congkar selalu diwarnai konflik baik konflik di tengah kehidupan masyarakat maupun konflik dalam ranah pemerintahan desa. Hal ini menyebabkan seluruh masyarakat tidak mengutamakan musyawarah dalam mencapai mufakat. Musyawarah tidak lagi dilihat sebagai hal yang esensial dalam membahas keputusan bersama. Untuk keluar dari situasi konflik politik tersebut, seluruh masyarakat dan pemerintah desa harus memahami demokrasi Pancasila terkhusus nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Dengan demikian, mereka bermusyawarah dalam mencapai mufakat dan menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat.

Sila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” adalah upaya dalam mengatasi konflik politik pemilihan Kepala Desa Compang Congkar. Ada beberapa nilai penting yang perlu dikembangkan dalam mengatasi persoalan politik di Desa Compang Congkar, seperti nilai kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, wujud pemimpin yang adil, dan demokrasi. *Pertama*, kerakyatan. Nilai kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila mau menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi itu harus benar-benar berada di tangan rakyat dan diabdikan untuk

kebaikan rakyat. *Kedua*, hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, bijak memilih pemimpin, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, penuh tanggung jawab, serta bertindak sesuai dengan bisikan hati nurani. *Ketiga*, permusyawaratan. Permasyarakatan adalah usaha untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, dan melalui kegiatan musyawarah demi mencapai mufakat. *Keempat*, perwakilan. Perwakilan dalam sila keempat Pancasila berarti suatu tata cara mengusahakan partisipasi rakyat untuk mengambil bagian dalam kehidupan bernegara dan dilakukan melalui badan perwakilan. Badan ini terdiri dari anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan daerah, dan golongan-golongan yang ditetapkan dengan undang-undang. Untuk itu, MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang meneruskan keputusan-keputusan rakyat dalam persidangan atau musyawarah. *Kelima*, wujud pemimpin yang adil. Seorang pemimpin sejati mesti mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mengetahui jati dirinya dan menyadari bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. *Keenam*, demokrasi. Demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Sebagai sistem nilai, demokrasi menghendaki kebebasan bagi rakyat dalam menyatakan pendapat. Namun, demokrasi yang dianut Negara Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Untuk itu, harus berdasarkan sikap jujur dan mengedepankan bisikan hati nurani. Demokrasi Pancasila menuntut keselarasan dan keadilan dalam tata kehidupan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Nilai-nilai tersebut menjadi hal fundamental dalam membentuk warga negara yang demokratis. Sila keempat Pancasila mau mempertegas bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Perbedaan pendapat dan pandangan dalam kegiatan musyawarah membuktikan adanya suasana kehidupan politik yang demokratis. Selain itu, semangat demokrasi Pancasila adalah kekeluargaan, yang di dalamnya menuntut kesetaraan demi tujuan bersama. Hakikat demokrasi adalah menuntut adanya pengakuan dan kesetaraan. Pengakuan yang dimaksudkan di sini adalah pemberian dan keterbukaan diri dalam menerima pendapat dan mengakui keberadaan pihak lain dalam komunitas masyarakat. Pengakuan berarti menghormati pendapat orang lain dan menjadikan pendapat itu sebagai keputusan penting dalam mencapai mufakat. Sedangkan, kesetaraan merujuk pada persamaan hak dan kebutuhan fisik, sehingga

semua orang merasakan kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan demikian, semua orang bisa merasakan jaminan distribusi keadilan yang sama dan seimbang.

Untuk konteks Compang Congkar, perwujudan sila keempat Pancasila menjadi suatu gerakan penting dalam mengatasi problematika politik pemilihan Kepala Desa Compang Congkar. Hal ini bertujuan agar demokrasi di Desa Compang Congkar berjalan semestinya. Untuk itu, realitas perpecahan itu mesti diatasi secara bersama melalui kegiatan musyawarah. Musyawarah menjadi hal yang penting dalam mempersatukan perbedaan. Demi mencapai persatuan dan kesatuan di Desa Compang Congkar, ada beberapa strategi yang ditawarkan sila keempat Pancasila. *Pertama*, memprioritaskan budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. *Kedua*, mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat. *Ketiga*, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. *Keempat*, menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bersama. *Kelima*, keaktifan dalam mengikuti pemilihan umum (pemilihan Kepala Desa). *Keenam*, bijaksana memilih pemimpin, dalam artian bahwa bukan karena uang, keluarga, tapi dilihat dari kualitas pemimpin.

## **5.2 Usul dan Saran**

### **5.2.1 Bagi Keluarga**

Keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang memainkan peran penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Di dalam keluarga, anak menerima materi praktis dari orang tuanya, seperti menghormati orang tua, mendengarkan orang lain, dan lain sebagainya. Ini merupakan peran penting yang diemban orang tua. Selain itu, orang tua merupakan pusat perlindungan (*proteksi*) dan kasih sayang (*afeksi*) sebelum anak mengenal dunia luar. Untuk itu, keluarga mempunyai peran penting dalam membentuk karakter seorang anak, sehingga seorang anak menjadi pribadi yang demokratis dan matang secara politik. Keluarga mesti mengajarkan nilai-nilai praktis yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Selain itu, orang tua juga mesti memberikan kebebasan kepada anak dalam menyatakan pendapat dan memberikan hak kepada anak agar bisa mengekspresikan keberadaannya sebagai pribadi yang berkarakter dan berintelektual.

### 5.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan

Sekolah merupakan lembaga formal yang dibentuk guna memperkaya wawasan dan membentuk karakter peserta didik. Materi yang ditransfer dalam lembaga pendidikan bersifat struktural. Artinya, materi disiapkan terlebih dahulu sebelum guru mentransferkannya kepada anak didik. Lembaga pendidikan mempunyai peran yang penting dalam mendidik peserta didik menjadi pribadi yang demokratis dan beradab. Untuk mewujudkan hal tersebut, lembaga pendidikan mesti mempertegaskan kembali pendidikan karakter bagi peserta didik. Pendidikan karakter di lingkungan sekolah dapat membentuk moral peserta didik, sehingga peserta didik mampu membedakan dan memilah mana yang perlu dilakukan dan mana yang harus dihindarkan. Untuk itu, perwujudan pendidikan karakter di lingkungan sekolah harus dipertegaskan kembali dan mesti diajarkan secara utuh dan menyeluruh kepada anak didik. Penting untuk diingat bahwa selain membentuk moral peserta didik, pendidikan karakter juga bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, kerja sama, dan menghormati perbedaan.

### 5.2.3 Bagi Pemerintah Desa Compang Congkar

Pemerintah Desa Compang Congkar merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai hak dan wewenang khusus dalam mengontrol dan menjaga keseimbangan tatanan sosial kehidupan masyarakat Compang Congkar. Tugas itu dikontrol pemerintah desa dan aparatnya dalam perencanaan pembangunan desa berkelanjutan. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, dalam perencanaan pembangunan desa berkelanjutan, pemerintah Desa Compang Congkar mesti transparan terhadap semua pengeluaran atau dana-dana yang dialokasikan terhadap pembangunan desa dan untuk kualitas hidup masyarakat yang sejahtera. Pemerintah Desa Compang Congkar perlu memahami esensi demokrasi. Selain itu, perlu mengadakan sosialisasi terbuka tentang pentingnya demokrasi di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah Desa Compang Congkar mengetahui dengan jelas bahwa kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan diabdikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

#### 5.2.4 Bagi Lembaga Gereja

Gereja merupakan salah satu institusi sosial yang mempunyai peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Compang Congkar. Peran serta gereja sangat berpengaruh dalam membentuk kehidupan masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku dalam komunitas masyarakat. Lembaga gereja perlu menjelaskan kepada seluruh rakyat dan pemerintahan desa bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sederajat. Selain itu, gereja harus membongkar sekat-sekat pemisah yang membatasi hubungan manusia (ciptaan) dan Tuhan (pencipta). Gerakan ini mesti dilakukan secara universal dalam kehidupan masyarakat dan tidak memfokus pada golongan tertentu saja. Karya misi di tengah masyarakat mesti didasar oleh semangat iman yang kokoh kepada Yesus Kristus. Karya pewartaan Yesus Kristus harus menjadi fondasi dalam melayani dan memberi motivasi umat manusia. Dengan demikian, masyarakat Desa Compang Congkar dapat memperlakukan sesama secara adil.

#### 5.2.5 Bagi Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan lembaga atau badan yang bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara tradisi, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Lembaga ini juga berperan dalam mengurus berbagai konflik dalam komunitas masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Compang Congkar yang selalu mengalami konflik politik dan berbagai konflik sosial lainnya, lembaga adat mesti menjadi salah satu badan yang bertanggung jawab mempersatukan pihak yang berkonflik. Jalan yang ditempuh adalah jalan musyawarah. Musyawarah dalam menyatukan keputusan bersama serta mencari solusi dari sebuah persoalan. Kegiatan musyawarah yang berkembang dalam masyarakat Indonesia saat ini pertama kali muncul dan berkembang dalam masyarakat adat. Untuk itu, lembaga adat hendaknya memperkuat kerja sama dengan lembaga pemerintah desa dan mendukung kegiatan serta berbagai program yang dicanangkan pemerintah desa terutama pengakuan hak-hak masyarakat. Lembaga adat hendaknya mempertegas seluruh masyarakat Compang Congkar bahwa musyawarah mencapai mufakat merupakan hal penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu, mempertegas kepada tokoh pemerintah bahwa kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat.

### 5.2.6 Bagi Masyarakat Compang Congkar

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang tinggal bersama dalam suatu wilayah atau lingkungan masyarakat dan memiliki struktur sosial, norma, nilai-nilai, dan interaksi yang kompleks. Ini mencakup aspek politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Kehidupan setiap individu dalam kelompok masyarakat ditandai dengan relasi dan komunikasi. Relasi itu menandakan bahwa setiap pribadi perlu membangun komunikasi yang terbuka dan saling membutuhkan satu dan yang lain. Komunikasi yang dibangun dalam komunitas masyarakat merupakan ekspresi kebebasan manusia sebagai pribadi ciptaan Tuhan yang bermartabat. Komunikasi itu hendaknya bersifat terbuka tanpa ada paksaan dari pihak lain. Kebebasan setiap pribadi dalam menyatakan pendapat merupakan bentuk esensial dari negara demokrasi. Untuk itu, masyarakat Desa Compang Congkar hendaknya menerima dan mengakui yang lain (*the other*) sebagai bagian dari kehidupan bersama. Dengan mengakui dan menerima keberadaan sesama dalam kelompok masyarakat, masyarakat Compang Congkar merasakan keadilan. Selain itu, bisa bekerja sama dalam membangun Desa Compang Congkar yang demokratis dan harmonis.

### 5.2.7 Bagi Calon Kepala Desa Compang Congkar

Calon Kepala Desa (cakades) adalah individu yang mencalonkan diri untuk jabatan Kepala Desa dalam pemilihan desa yang diadakan secara demokratis oleh masyarakat setempat. Mereka berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari warga desa yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan desa. Untuk itu, Calon Kepala Desa Compang Congkar mesti memahami kebutuhan masyarakat. Mereka juga harus memahami kehidupan desa yang mencakup pemetaan masalah dan potensi desa, seperti memahami masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Calon Kepala Desa Compang Congkar juga perlu mengidentifikasi potensi yang bisa dikembangkan, seperti sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal. Selain itu, merekrut dan bekerja sama dengan orang-orang yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi. Dengan menerapkan saran-saran itu, calon Kepala Desa Compang Congkar dapat menciptakan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. DOKUMEN

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Timur. *Kecamatan Congkar dalam Angka 2023*. Borong: Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Timur, 2023.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar* (Pasal 18 ayat (1) UUD) 1945.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Surabaya: Permata Press, 2015.

### II. BUKU

- Affandi, Hernadi. *Pancasila Eksistensi dan Aktualisasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.
- Albertus, Doni Koesoema. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2015.
- . *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Bastian, Sunil and Robin Luckham, *Can Democracy be Designed? The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies*. London: Zed Books, 2003.
- Beoang, Yakob Dere. *Korelasi Antara Kualitas Pemimpin Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih: Suatu Telaah dari Perspektif Keteladanan Yesus*. Jakarta: Cerdas Pustaka, 2014.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Bhaghi, Silvano Keo. *Negara Bukan-bukan?* Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Bhila, Kanis. *Pengantar Pendidikan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2022.
- Bielefeldt, Heiner. *Politik Kesetaraan: Dimensi-dimensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. penerj. Trisno Sutanto. Bandung: Mizan, 2019.
- Bolo, Andreas Doweng dkk. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012.
- Croch, Colin. *Post-Democracy after The Crises*. Inggris: Polity Press, 2020.
- Darmodiharjo, Darji. *Pancasila Suatu Orientasi Singkat: Dilengkapi dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ketetapan MPR no. II/MPR/1978)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1979.



- Deki, Kanisius Teobaldus. *Tradisi Lisan Orang Manggarai Membedik Persaudaraan dalam Bingkai Sastra*. Jakarta: Parrhesia Institute, 2011.
- Dipoyudo, Kirdi. *Membangun atas Dasar Pancasila*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1990.
- Djamil, D. *Pokok-Pokok Bahasan Pancasila*. Bandung: Remadja Karya VC, 1984.
- Efriza dan Jerry Indrawan. *Pengantar Politik Sebuah Telaah Empirik dan Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Hatta, Mohammad dkk. *Uraian Pancasila Dilengkapi dengan dokumen Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*. Jakarta: Mutiara, 1980.
- Heryanto, Gun Gun. *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Juliantara, Dadang. *Meretas Jalan Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Kalyvas, Andreas. *Democracy and The Politics of The Extraordinary Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt*. Amerika Serikat: Cambridge University Press, 2008.
- Kirchberger, Georg. *Allah Menggugat sebuah Dogmatik Kristiani*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2020.
- Kleden, Paul Budi. *Catatan tentang Pemilu: Bukan Doping Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- . *Membongkar Derita*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2006.
- Kono, Redem. *Senandung Suara-suara Minor Will Kymlicka tentang Hak-hak Minoritas dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*. Bandung: Matahari, 2016.
- Koten, Yosef Keladu. *Partisipasi Politik: Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Kurniawan, Luthfi J. *Keadaban Politik Membincang Kekuasaan Merawat Kewarasan*. Malang: Intrans Publishing, 2021.
- Lasiyo, Sri Soeprapto, dan Reno Wikandaru. *Pancasila*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- . *Wawasan Pancasila Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*. Jakarta: Mizan, 2020.
- Maksudi, Beddy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman secara Teoretik dan Empirik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Mertopraeiro, H. Soedarsono. *Implementasi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Indonesia dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.
- Mohammad Hatta, dkk., *Uraian Pancasila*. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1977.

- Neolaka, Amos. *Isu-Isu Kritis Pendidikan Utama dan Tetap Penting Namun Terabaikan*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.
- Poespowardojo, M. T. Soerjanto dan Alexander Seran. *Pancasila: Filsafat Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Roh Revolusi Mental*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021.
- Poespowardojo, Soerjanto. *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Popper, Karl R. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, penerj. Uzair Fauzan. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002.
- Pranarka, A.M.W. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: Centre For Strategic and International Studies, 1985.
- Rahardjo, Iman Toto K. dan Herdianto Wk, *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari: Kenangan 100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Raho, Bernard. *Sosiologi Agama*. Maumere: Ledalero, 2019.
- Riberu, J. *Dasar-Dasar Kepemimpinan: Pegangan Praktis bagi Pemimpin Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional (LEPPENAS), 1982.
- Simandjuntak, B. *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*. Bandung: Penerbit Alumni, 1984.
- Sintani, Lelo dkk. *Dasar Kepemimpinan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2022.
- Smith, Anthony D. *Nationalism: Theory, Ideologi, History*. Cambridge: Polity Press, 2010.
- Stivens, Maila. *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*. Australia: Glen Waverley, 1991.
- Sumawinata, Sarbini. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Suwardi, Harsono, Sasa Djuarsa Sendjaja, dan Setio Budi. *Politik, Demokrasi dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. 15.
- Suwarno, P.J. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Syam, Nur. *Tantangan Multikulturalisme Indonesia dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Unger, Roberto Mangabeira. *Democracy Realized: The Progressive Alternative*. London: Verso, 1998.
- Wicaksana, Anom Whani. *Soekarno Sang Guru Bangsa*. Yogyakarta: C-Klik Media, 2018.
- Widjaja, Albert. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, 1982.

### III. JURNAL

- Akbar, Bimahendra Ramadhani dkk. “Implementasi Pancasila sebagai Pedoman Kehidupan Bermasyarakat”. *Jurnal Intelektiva*, 4:4, Surakarta: Desember 2022.

- Arianto, Agus. “Konsep Nasionalisme Michael Sastrapratedja: Sebuah Tinjauan Filsafat Pancasila dalam Rangka Pengembangan Karakter Bangsa”. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6:3, Yogyakarta: September 2023.
- Aulia, Nazlah. “Tinjauan Filsafat Sila Ke-4 Pancasila Terhadap Pilihan Wakil Rakyat Oleh Mahasiswa”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 2:1, Malang: Maret 2024.
- Fahri, Lalu Moh. dan Lalu A. Hery Qusyairi. “Interaksi Sosial dalam Proses Pembelajaran”. *Jurnal Studi Keislaman dan Studi Pendidikan*, 7:1, Lombok: Mei 2019.
- Jagom, Bonifasius dan Sefrianus Juhani. “Korelasi Pribahasa *Neka Behas Neho Kena, Neka Koas Neho Kota* pada Masyarakat Manggarai dengan Sila Ketiga Pancasila”. *Jurnal Pendidikan*, 11:1, Januari-April, 2023.
- Kaelan. “Kesatuan Sila-sila Pancasila”. *Jurnal Filsafat*, 1:1, Yogyakarta: Desember 1996.
- Madung, Otto Gusti. “Teror, Pluralisme, dan Konsep Hidup Bersama”. *Jurnal Ledalero*, 8:2, Maumere: Desember 2009.
- Mogea, Tini dan Salaki Reynaldo Joshua. “The Spirit of Democracy as Seen in Walt Whitman’s: I Hear America Singing”. *Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris*, 2:3, Yogyakarta: Desember 2022.
- Mulyono, Galih Puji dan Rizal Fatoni. “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia”. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7:2, Malang: Oktober 2019.
- Nahuddin, Yusuf Eko. “Pemilu dalam Sistem Demokrasi Perspektif Sila ke-4 Pancasila”. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8:2, Malang: Desember 2017.
- Ramadhani, Kania Nova dan Yakobus Ndonga. “Eksistensi Nilai Kerakyatan dalam Demokrasi Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 2:2, Malang: Juni 2024.
- Salyo, Ridho dkk. “Pancasila di Era Milenial: Makna dan Relevansinya Bagi Masa Depan Bangsa”. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1:2, Jakarta: November 2022.
- Santoso, Eka Putra B. “Pemilu dan Pilkada dalam Pusaran Politik Identitas”. *Jurnal Sosial Politik*, 2:2, Wonosobo: Desember 2019.
- Sugiastuti, Reika Happy dan Muhammad Rizki Pratama. “Dampak Buruk Pembangunan Tanpa Pemerataan: Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah di Indonesia”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 16:1, Malang: Januari 2022.
- Susanto, Sri Nur Hari. “Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945”. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, 43:2, Semarang: April 2014.
- Utami, Pratiwi. “Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian and Democracy”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22:2, Monash University Australia: November 2018.
- Wungow, Jefri. “Indonesianisasi Kristologi Perikemanusiaan dan Kristologi: Aplikasi Sila Kedua Pancasila dalam Kekristenan”. *Jurnal Teologi Biblika dan Praktika*, 4:2, Malang: April 2018.

#### IV. SKRIPSI

Judin, Frederikus. “Menyibak Praksis Lonto Leok di Manggarai sebagai Perwujudan Demokrasi Lokal (Suatu Tinjauan Filosofos dari Perspektif Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas)”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.

#### V. ARTIKEL

Arianto, Stevanus Findi. “Filsafat Politik Karl Marx dan Hidup Bersama di Indonesia”, dalam Reza A.A Wattimena, ed. *Filsafat Politik untuk Indonesia dari Pemikiran Plato, Edmund Husserl, Charles Taylor, sampai dengan Slavoj Zizek*. Pustaka Mas, 2011.

Basyaib, Hamid, Richard Holloway, dan Nono Anwar Makarim. “Mencuri Uang Rakyat 16 Kajian Korupsi di Indonesia: Buku 4 Mencari Paradigma Baru”, dalam Masdar F. Mas’udi, ed. *Korupsi dalam Perspektif Budaya dan Syariat Islam*. Jakarta: Yayasan Aksara, 2002.

Buntu, Ivan Sampe. “Hakikat Persatuan dalam *Tongkonan* di Toraja”, dalam Armada Riyanto dkk, ed. *Kearifan Lokal Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.

Feinberg, Joel, “Hak-hak Asasi Manusia”, dalam Frans Ceunfin, ed. *Hak-Hak Asasi Manusia Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2007.

Hariyono. “Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik”, dalam Nabhan F. Choiron dkk, ed. *Diskursus Ilmu Sosial Budaya Indonesia*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2021.

Hoffe, Otfried, “Cita Rasa Kewargaan”, dalam Felix Baghi, ed. *Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik*. Maumere: Ledalero, 2009.

Hutabarat, Harry Ara. “Demokrasi Pancasila, Permusyawaratan, Perwakilan: Suatu Kehidupan Bernegara yang Modern”, dalam Broery Doro Pater Tjaja, Defli Yandika Ruso, dan Jumady Sinaga, ed. *Pancasila Rumah Bersama*. Jakarta: Libri, 2017.

Nggili, Ricky Arnold. “Persatuan Indonesia: Ciri Masyarakat Inklusif yang Bergotong Royong”, dalam Broery Doro Pater Tjaja, Defli Yandika Ruso, dan Jumady Sinaga, ed. *Pancasila Rumah Bersama*. Jakarta: Libri, 2017.

Purbopranoto, Kuntjoro. “Hak-Hak Asasi Manusia dalam Pancasila”, dalam Darji Darmodiharjo, dkk, ed. *Santiaji Pancasila Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*. Jakarta: Kurnia Esa, 1983.

Santika, Gusti Ngurah Gede Sujana, dan Made Astra Winaya. “Kesadaran Politik: Dari Peran Tokoh Agama dan Partisipasi Politik Umat Hindu”, dalam Nyoman Yoga Segara, ed. *Politik Hindu Sejarah, Moral dan Proyeksinya*. Denpasar: IHDN PRESS, 2019.

Savirani, Amalinda dan Olle Tornquist. “Reclaiming the State: Mengatasi Problem Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto”, dalam Eric Hiariej, ed. *Lahirnya Pasca-Klientelisme di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov dan PCD Press, 2016.

## VI. WAWANCARA

Bagus, Niko. Wawancara, 1 Januari 2024.

Dam, Damasus. Wawancara, 1 Januari 2024.

Danur, Stanis dan Bapak Yuvens Nurdin. Wawancara, 23 Desember 2023.

Darson, Irenius. pada 12 Juni 2024 melalui via telepon.

----- . Wawancara, 4 Agustus 2023.

----- . Wawancara, 7 Agustus 2022.

Fartoyo, Inosensius. Wawancara, 29 Desember 2023.

Fiantry, Oktavia. Wawancara, 1 Januari 2024.

Harto, Silfanus. Wawancara, 29 Desember 2023.

Jangga, Frederikus. Wawancara, 30 Juli 2023.

Madur, Zakarias. Wawancara, 4 Januari 2024.

Nadur, Stefanus. Wawancara, 30 Juli 2023.

Nurdin, Yuvens. Wawancara, 23 Desember 2023.

----- . Wawancara, 29 Desember 2023.

----- . Wawancara, 30 Juli 2023.

Santus, Fransiskus. Wawancara, 30 Juli 2023.

Sardi, Adrianus. Wawancara, 30 Juli 2023.

Shagun, Hironimus. Wawancara, 2 Agustus 2022.

----- . Wawancara, 6 Agustus 2022.

Sukur, Frudensius. Wawancara, 1 Januari 2024.

## VII. INTERNET

Badan Permusyawaratan Desa. “Desa Kertamulya Kabupaten Bandung Barat”. Dalam *Padalarang.desa.id*, <https://kertamulya-padalarang.desa.id/lembaga/detail/badan-permusyawaratan-desa-32-17-082001>, diakses pada 23 April 2024.

Chairil, Tangguh dan Wendsney A. Sadi. “Konflik Papua: Pemerintah Perlu Mengubah Pendekatan Keamanan dengan Pendekatan Humanis”. Dalam *Bina Nusantara University*, <https://ir.binus.ac.id/2020/10/05/konflik-papua-pemerintah-perlu-mengubah-pendekatan-keamanan-dengan-pendekatan-humanis/>, diakses pada 26 Januari 2024.

CNN Indonesia. “Sejarah Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia”. Dalam *CNN Indonesia.Com*, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230220112500-569-915287/sejarah-perumusan-pancasila-sebagai-dasar-negara-indonesia>, diakses pada 24 Agustus 2023.

Desipermatasari. “Pancasila: Sejarah Perumusan sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup, dan Upaya Pelestarian Ideologi”. Dalam *Kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2021/05/30/sejarah-perumusan-pancasila-sebagai-dasar-negara-dan-pandangan-hidup-bangsa>, diakses pada 24 Agustus 2023.

Hellen. “Hari Lahir Pancasila: Sejarah dan Maknanya”. dalam *kementerian keuangan republicindonesia*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca-artikel/15075/Hari-Lahir-Pancasila-Sejarah-dan-Maknanya.html>, diakses pada 2 Maret 2023.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. “Bentuk dan Wujud Penerapan Sikap dan Perilaku Bela Negara”. Dalam *Kemhan.go.id*, <https://www.kemhan.go.id/pothan/2018/08/28/bentuk-dan-wujud-penerapan-sikap-dan-perilaku-bela-negara.html>, diakses pada 15 Maret 2023.

Maharani, Tsarina. “KALEIDOSKOP 2019: Tragedi Pemilu, dari petugas KPPS hingga Kerusuhan 21-22 Mei”. Dalam *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/23/07294701/kaleidoskop-2019-tragedi-pemilu-dari-petugas-kpps-tewas-hingga-kerusuhan-21>, diakses pada 15 Maret 2023.

Nailufar, Nibras Nada. “Maksud Ucapan Soekarno: Perjuanganku Lebih Mudah...”. Dalam *Kompas.Com*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/08/10/083500369/maksud-ucapan-soekarno--p-erjuanganku-lebih-mudah--?page=all>, dikases pada 2 Maret 2023.

Tonny, Antonius Rahu. Ed. “44.630 Jiwa Penduduk Manggarai Timur Berkategori Miskin Ekstrem”. Dalam *Congkasae.com*, <https://www.congkasae.com/2021/11/44630-jiwa-penduduk-manggarai-timur.html>, diakses pada 23 November 2023.

## VIII. MAJALAH

KPPS. “Perincian Perolehan Suara Calon Kepala Desa Compang Congkar Periode 2022-2027”. Pada 2022.

## LAMPIRAN

Untuk merealisasikan pertanyaan-pertanyaan berikut, penulis melakukan penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang mengetahui lebih baik konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Compang Congkar. Ini dilakukan untuk mendukung penelitian ini sebagai karya ilmiah yang layak untuk dipublikasikan.

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana sejarah kampung Pata?
2. Bagaimana usaha masyarakat kampung Pata dalam mengatasi wabah yang dipengaruhi oleh budaya tenun?
3. Bagaimana sejarah kampung Congkar?
4. Apa alasan mendasar yang membuat masyarakat kampung Congkar tetap melestarikan budaya tenun?
5. Apakah segala urusan adat di Desa Compang Congkar dapat dipandu oleh kaum perempuan?
6. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Compang Congkar?
7. Bagaimana perkembangan pendidikan di Desa Compang Congkar saat ini?
8. Apakah masyarakat Compang Congkar mempercayai dan meyakini akan adanya roh alam?
9. Apa perbedaan antara ritus *ting ghan* dan ritus *ting ghelang*?
10. Apakah masyarakat Compang Congkar mempercayai akan adanya roh halus?
11. Bagaimana pemahaman masyarakat Compang Congkar tentang politik?
12. Apa alasan terjadinya kekerasan verbal selama pemilihan Kepala Desa Compang Congkar?
13. Apakah pernah terjadi konflik pengambilan hak milik selama pemilihan Kepala Desa Compang Congkar?

14. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pemilihan Kepala Desa Compang Congkar?
15. Apakah selama pemilihan Kepala Desa Compang Congkar pernah terjadi pembelian suara atau membagikan uang kepada khalayak banyak?
16. Apakah pembangunan di Desa Compang Congkar telah dialokasikan secara merata?
17. Bagaimana sejarah kehadiran agama di Desa Compang Congkar!
18. Bagaimana proses pemilihan Kepala Desa Compang Congkar dari tahun 2000 sampai tahun 2022?



Peta Desa Compang Congkar

